

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang memerlukan pertimbangan yang cermat karena merupakan proksi dari kemiskinan relatif yang diukur dengan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai keadaan yang menggambarkan adanya perbedaan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di dalam suatu wilayah yang sama. Menurut Heryanah (2017) Ketimpangan pendapatan merupakan ketidakmerataan pembagian pendapatan di kalangan penduduk. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi pada antar lapisan masyarakat, pada wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, serta antarwilayah yang meliputi antarprovinsi maupun antarkawasan seperti Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur.

Menurut Sjafrizal (2012) Ketimpangan yang terjadi antar daerah merupakan suatu kondisi yang relatif wajar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Perbedaan tersebut menyebabkan tingkat pendapatan yang diterima oleh penduduk di masing-masing wilayah tidak sama, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, variasi dalam ketersediaan sumber daya juga memengaruhi proses pembangunan di setiap daerah.

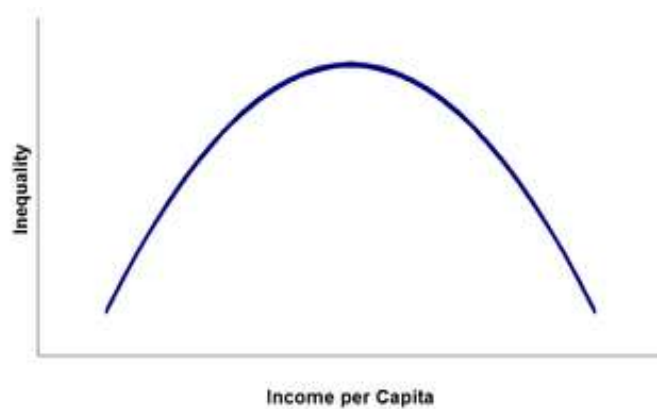
Perbedaan proses pembangunan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan antara wilayah yang lebih maju dengan wilayah yang masih tertinggal.

Todaro dan Smith (2003) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki beberapa dampak, antara lain: Ketimpangan pendapatan yang parah menyebabkan inefisiensi ekonomi, Ketimpangan pendapatan yang tinggi merusak stabilitas sosial dan solidaritas, Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.

Kesenjangan pendapatan, diukur menggunakan *Gini Ratio*, adalah indikator ketimpangan antar kelompok masyarakat. Perekonomian yang tidak seimbang dengan pertumbuhan yang timpang ditandai oleh ketidakmerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Alfinur, K, 2024). Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana *Gini Ratio* menunjukkan semakin memburuknya ketimpangan kesejahteraan. Pada beberapa kasus, pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok berpendapatan rendah hanya mengalami pertumbuhan yang relatif kecil.

2.1.1.2 Teori Ketimpangan pendapatan

Menurut hipotesis neo-klasik, pada tahap awal proses pembangunan suatu negara, kesenjangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Ketimpangan tersebut akan terus bertambah hingga mencapai titik puncak. Setelah mencapai tahap tersebut, apabila pembangunan ekonomi terus berlanjut, maka perbedaan pembangunan antar wilayah akan mulai menurun secara bertahap. Pola perkembangan ketimpangan antar wilayah ini digambarkan dalam bentuk kurva yang menyerupai huruf U terbalik.



Gambar 2. 1 Kurva Kuznets

Menurut Simon Kuznets (dalam Rambey, 2018) pada tahap awal pembangunan ketimpangan cenderung meningkat, namun akan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan pemerataan akses ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, variabel Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur dipandang sebagai faktor yang memengaruhi dinamika ketimpangan dalam kerangka Kurva Kuznets.

Indeks Demokrasi berperan dalam mendorong kebijakan redistribusi pendapatan (Ramadhan, 2023). Indeks Demokrasi merepresentasikan kualitas institusi dan kebijakan publik yang dapat menentukan apakah hasil pembangunan didistribusikan secara inklusif atau justru ekstraktif terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Sari et al, 2024). Semakin baik kualitas demokrasi dan institusi, maka peluang masyarakat dalam memperoleh akses ekonomi, pendidikan, dan kebijakan redistributif akan semakin besar sehingga ketimpangan dapat ditekan. Namun, apabila demokrasi masih bersifat elitis dan institusi bersifat ekstraktif, maka pembangunan justru berpotensi meningkatkan ketimpangan.

Tenaga Kerja berkaitan dengan proses distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar kerja. Apabila penyerapan tenaga kerja meningkat dan kesempatan kerja semakin merata, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat secara lebih luas sehingga ketimpangan menurun. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tenaga kerja tertentu, maka kesenjangan pendapatan akan semakin besar (Rosalitta, 2022).

Infrastruktur berperan sebagai sarana pemerataan akses ekonomi antarwilayah (Kartiasih, 2019). Teori Kuznets menjelaskan bahwa ketimpangan pada tahap awal pembangunan sering terjadi karena aktivitas ekonomi hanya terpusat di wilayah tertentu. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dapat memperluas konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Dengan semakin meratanya pembangunan infrastruktur, maka manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sehingga ketimpangan pendapatan cenderung menurun.

Dengan demikian, ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam menentukan posisi suatu wilayah dalam tahapan Kurva Kuznets serta memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui *Gini Ratio*.

2.1.1.3 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Terdapat berbagai metode untuk mengukur ketimpangan pendapatan dua diantaranya yang paling umum digunakan yaitu:

1. *Gini Ratio*

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), *Gini Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk yang digambarkan melalui kurva Lorenz. Nilai *Gini Ratio* berada pada rentang 0 hingga 1 dan digunakan untuk menunjukkan tingkat ketidakmerataan dalam suatu masyarakat. Semakin kecil nilai *Gini Ratio*, maka distribusi pendapatan di antara penduduk semakin merata. Sebaliknya, apabila nilai *Gini Ratio* mendekati 1, maka ketimpangan pendapatan semakin tinggi, yang menggambarkan kondisi ketika sebagian besar pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok kecil dalam masyarakat.

Rumus menghitung nilai Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

Keterangan :

GR : Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

P_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika:

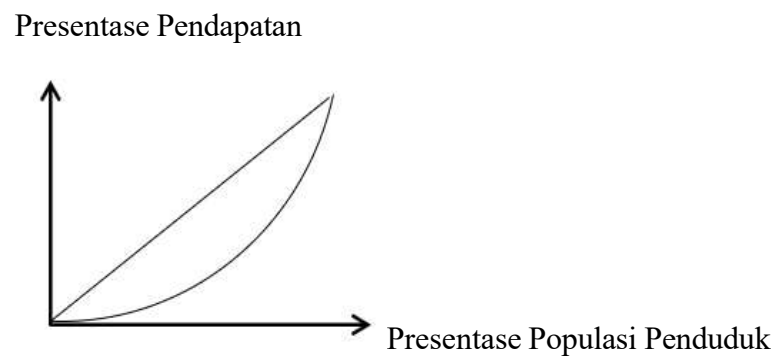
a. $G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah

b. $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang

c. $G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan kurva yang dibentuk dari data yang digunakan dalam perhitungan size distribution, kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Melalui kurva tersebut, gambaran mengenai distribusi dapat diamati secara visual sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 2 Kurva Lorenz

Berdasarkan gambar 2.2, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Kurva Lorenz dapat dilihat dari jarak antara garis kurva dengan garis diagonal. Apabila garis kurva semakin mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan cenderung semakin merata. Sebaliknya, jika garis kurva semakin menjauh dari garis diagonal, hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata.

2.1.2 Indeks Demokrasi

2.1.2.1 Pengertian Indeks Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan (Al-Khansa & Dewi, 2021). Para ahli memiliki berbagai definisi mengenai demokrasi. Abraham Lincoln (dalam Prayitno & Prayugo, 2023) mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara itu, Hans Kelsen (dalam Malik et al., 2021) menjelaskan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan bertujuan untuk kepentingan rakyat, di mana pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan kepercayaan terhadap aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut.

Demokrasi dapat berperan dalam menekan ketimpangan antarwilayah melalui penerapan kebijakan redistribusi yang lebih merata, misalnya melalui desentralisasi kekuasaan yang memberi peluang bagi daerah tertinggal untuk memperoleh perhatian dan dukungan pembangunan yang lebih besar (Santi & Iskandar, 2021). Namun demikian, apabila kekuasaan politik lebih banyak dikuasai oleh wilayah yang sudah maju, sistem demokrasi justru berpotensi memperlebar ketimpangan wilayah karena kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih berpihak pada daerah perkotaan (Acemoglu et al., 2019). Selain itu, rendahnya kapasitas administrasi di wilayah yang sedang berkembang juga dapat menghambat

pelaksanaan kebijakan redistribusi secara efektif, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur yang belum memadai, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi (Ramadhan, 2023). Kondisi tersebut sering kali menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak merata, meningkatkan potensi terjadinya korupsi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

2.1.2.2 Teori Indeks Demokrasi

Teori yang dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson (dalam Sari et al. 2024) menekankan bahwa perbedaan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan antarnegara maupun antarwilayah sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang berlaku, khususnya institusi politik dan ekonomi. Dalam karya mereka seperti *Why Nations Fail* (2013), dijelaskan bahwa terdapat dua tipe institusi utama, yaitu institusi inklusif (*inclusive institutions*) dan institusi ekstraktif (*extractive institutions*). Institusi inklusif adalah sistem yang memberikan kesempatan yang luas dan setara kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, memiliki hak kepemilikan yang jelas, akses terhadap pendidikan, serta perlindungan hukum yang adil. Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung memusatkan kekuasaan dan sumber daya hanya pada kelompok elite tertentu, sehingga membatasi akses masyarakat luas terhadap peluang ekonomi.

Dalam konteks demokrasi, tidak semua sistem demokrasi secara otomatis menghasilkan institusi yang inklusif. Pada kondisi tertentu, terutama di negara atau wilayah dengan kualitas demokrasi yang lemah, demokrasi justru dapat dimanfaatkan oleh kelompok elite untuk mempertahankan kekuasaan dan

kepentingannya. Fenomena ini sering terjadi ketika mekanisme demokrasi seperti pemilu, representasi politik, dan pembuatan kebijakan dikuasai oleh kelompok tertentu melalui praktik seperti politik uang, oligarki, atau dominasi kelompok berkepentingan. Akibatnya, meskipun secara formal menganut sistem demokrasi, institusi yang terbentuk tetap bersifat ekstraktif (Acemoglu & Robinson, 2019).

Lebih lanjut, teori ini juga menjelaskan bahwa institusi ekstraktif menghambat terciptanya kesempatan ekonomi yang merata (*equal economic opportunity*). Ketika akses terhadap pekerjaan, usaha, dan sumber daya produktif hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, maka distribusi pendapatan akan semakin terkonsentrasi. Oleh karena itu, teori ini juga dapat menjelaskan bahwa demokrasi yang tidak disertai dengan kualitas institusi yang baik berpotensi memperkuat struktur ekonomi yang tidak merata, sehingga ketimpangan pendapatan cenderung meningkat.

Dengan demikian, dalam perspektif teori Acemoglu dan Robinson, peningkatan demokrasi tidak selalu diikuti oleh penguatan institusi inklusif. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika kualitas demokrasi masih lemah, demokrasi justru dapat memperkuat dominasi kelompok elite dalam proses politik dan ekonomi. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, sehingga distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi menjadi tidak merata. Oleh karena itu, secara teoritis demokrasi yang tidak diimbangi dengan kualitas institusi yang baik dapat berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, karena berpotensi meningkatkan konsentrasi kekayaan dan membatasi akses ekonomi bagi sebagian besar masyarakat.

2.1.2.3 Pengukuran Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang disusun oleh Badan Pusat Statistik untuk menilai tingkat demokrasi secara kuantitatif. Indeks ini juga menggambarkan perkembangan kondisi demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam pengukurannya, IDI tidak hanya menilai kinerja pemerintah atau birokrasi semata, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi berbagai unsur lain seperti partai politik, lembaga legislatif daerah (DPRD), masyarakat, serta lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kemajuan nilai IDI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.

Tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dianalisis melalui IDI, yang menilai implementasi prinsip demokrasi di seluruh provinsi. Komponen utama IDI mencakup tiga dimensi fundamental (Badan Pusat Statistik, 2024):

1. Kebebasan (Liberalization)
 - a. Jaminan kebebasan dalam berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat, dan berekspresi dari pihak aparat negara.
 - b. Jaminan kebebasan dalam berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat, dan berekspresi antar individu dalam masyarakat.
 - c. Jaminan kebebasan dalam menjalankan keyakinan atau kepercayaan.
 - d. Jaminan kebebasan dalam berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat, berkeyakinan, dan berekspresi pada setiap kebijakan yang diambil.
 - e. Jaminan hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.

- f. Pemenuhan hak-hak bagi pekerja di tempat kerja.
 - g. Kebebasan pers dalam menjalankan fungsi dan perannya.
2. Kesetaraan (Equalization)
- a. Kesetaraan antara pria dan wanita pada beragam aspek kehidupan.
 - b. Pengambilan keputusan publik melalui lembaga legislatif dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat.
 - c. Menanggulangi praktik monopoli dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.
 - d. Penyediaan akses bagi masyarakat miskin terhadap perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan.
 - e. Kesetaraan kesempatan kerja di berbagai wilayah.
 - f. Akses yang adil bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
 - g. Kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan dasar.
3. Kapasitas Lembaga Demokrasi
- a. Kinerja yang efektif dari lembaga legislatif.
 - b. Kinerja yang objektif dan profesional dari lembaga yudikatif.
 - c. Netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pemerintah.
 - e. Komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
 - f. Keterbukaan pemerintah pada menyediakan informasi terkait anggaran negara, seperti APBN atau APBD.

- g. Pelayanan publik yang optimal diberikan oleh kinerja birokrasi.
- h. Pendidikan politik yang diberikan kepada kader partai politik.

Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan oleh badan pusat statistik meliputi tahap awal, pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi secara menyeluruh, seperti surat kabar, peraturan daerah, serta keputusan administratif yang berkaitan dengan pengukuran demokrasi. Setelah itu, peneliti menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) guna mengidentifikasi isu-isu yang mungkin belum terdeteksi pada tahap pengkodean awal serta untuk memperkaya temuan penelitian. Tahap berikutnya melakukan wawancara mendalam dengan para pakar di bidang terkait untuk menggali informasi tambahan. Seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari Badan Pusat Statistik tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dan pada tahap akhir diverifikasi oleh dewan ahli serta mitra profesional guna memastikan ketepatan dan kredibilitas hasil pengukuran.

Dalam IDI, skala 0–100 menggambarkan tingkat demokrasi, dengan 0 sebagai nilai terendah dan 100 sebagai nilai tertinggi. Skala ini dibagi menjadi tiga kategori: "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks antara 60–80), dan "buruk" (indeks < 60). Nilai terendah terjadi jika semua indikator memperoleh skor terendah, sementara nilai tertinggi tercapai jika semua indikator mendapat skor tertinggi (Badan Pusat Statistik, 2021).

2.1.3 Tenaga Kerja

2.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Pekerja atau tenaga kerja merupakan seluruh individu yang melakukan kegiatan kerja, baik pada sektor perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintahan. Menurut Sukirno (2004), angkatan kerja diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada periode tertentu, yang terdiri dari dua kelompok, yaitu mereka yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, angkatan kerja mencerminkan potensi sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang maupun jasa. Keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga kebutuhan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, keberadaan angkatan kerja yang memiliki keterampilan serta tingkat produktivitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong kemajuan dan perkembangan suatu negara.

Angkatan kerja umumnya diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15–64 tahun yang dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Nilai TPAK dapat memberikan gambaran mengenai tingkat

keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar tenaga kerja (Pramarta, N. A. 2021).

2.1.3.2 Teori Tenaga Kerja

Teori *Neoclassical Labor Market Theory* dalam pasar tenaga kerja menjelaskan bahwa tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Marshall (dalam Borjas, 2016). Dalam kerangka ini, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang akan digunakan hingga mencapai tingkat produktivitas marjinalnya. Ketika jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perekonomian meningkat, terutama akibat meningkatnya permintaan tenaga kerja oleh sektor-sektor produktif, maka semakin banyak individu memperoleh pendapatan dari pekerjaan, jadi ketika mereka bekerja maka akan memperoleh pendapatan untuk memperbaiki daya beli mereka, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Kondisi ini menyebabkan distribusi pendapatan menjadi lebih merata karena tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal, melainkan juga tersebar kepada kelompok pekerja, sehingga berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan (Mankiw, 2019).

Lebih lanjut, teori neoklasik juga menekankan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja (*labor market equilibrium*) akan tercapai ketika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan yang diminta. Dalam kondisi ini, tidak terjadi pengangguran involunter, sehingga sebagian besar angkatan kerja dapat terserap dalam kegiatan ekonomi. Ketika kesempatan kerja semakin luas dan tingkat pengangguran menurun, pendapatan kelompok berpendapatan rendah akan

meningkat secara relatif lebih cepat dibandingkan kelompok atas, yang pada akhirnya memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka teori neoklasik, peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi salah satu mekanisme penting dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan menurunkan tingkat ketimpangan (Todaro & Smith, 2015).

2.1.4 Infrastruktur

2.1.4.1 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana yang menunjang berlangsungnya aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar, seperti jaringan transportasi, komunikasi, distribusi, utilitas, penyediaan air, sistem drainase, serta penyediaan energi (Arga, K. I, 2022). Keberadaan infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, produktivitas tenaga kerja, serta memperluas akses terhadap kesempatan kerja. Selain itu, infrastruktur juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata serta mendukung terciptanya stabilitas makroekonomi, seperti keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap dinamika pasar tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*) yang menjadi tanggung jawab pemerintah, karena infrastruktur merupakan prasarana dasar yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas aktivitas ekonomi, serta menjadi prasyarat utama

agar roda perekonomian dapat berputar dengan baik dan berkelanjutan (Maqin, 2011).

Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kegiatan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan jalan yang memadai dapat memperlancar proses distribusi barang dan mobilitas masyarakat, sehingga biaya distribusi menjadi lebih efisien dan harga barang dapat lebih kompetitif di pasar (Iqbal, Rifin, dan Juanda, 2019). Selain itu, keberadaan sarana infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan mampu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kelancaran transportasi darat juga sangat dipengaruhi oleh kualitas serta panjang jaringan jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

2.1.4.2 Teori Infrastruktur

Teori *New Economic Geography (NEG)* yang dikembangkan oleh Paul Krugman (dalam Ruthshe, G, 2024) menjelaskan bahwa distribusi aktivitas ekonomi antarwilayah sangat dipengaruhi oleh biaya transportasi, skala ekonomi, dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, infrastruktur jalan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan penurunan biaya transportasi dan peningkatan konektivitas wilayah. Ketika rasio Panjang Jalan meningkat dan kualitasnya membaik, maka hambatan spasial antar wilayah akan berkurang sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di daerah tertentu dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Secara rinci, NEG menjelaskan bahwa penurunan biaya transportasi akibat pembangunan infrastruktur akan mendorong perusahaan untuk berlokasi di wilayah

tertentu yang memiliki akses pasar lebih besar (*market access*). Wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak industri karena biaya distribusi menjadi lebih rendah dan konektivitas antarwilayah meningkat. Kondisi ini menciptakan *agglomeration economies*, yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan karena berdekatan dengan pasar, tenaga kerja, dan jaringan produksi.

Secara teoritis, infrastruktur jalan memiliki kaitan dengan ketimpangan pendapatan karena aksesibilitas ekonomi antar wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur. Wilayah dengan infrastruktur jalan yang lebih baik cenderung memiliki akses ekonomi yang lebih tinggi diartikan sebagai kondisi dimana suatu wilayah memiliki kemudahan dalam mobilitas faktor produksi, distribusi barang dan jasa, serta keterhubungan dengan pasar dan pusat kegiatan ekonomi, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah tertinggal (Kartiasih, F, 2019). Berdasarkan teori *New Economic Geography* (dalam Ruthshe, G, 2024), peningkatan dan pemerataan panjang infrastruktur jalan memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, di mana semakin baik dan merata jaringan jalan maka semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
1	Riani, A. O., & Suseno, D. A. (2025)	Pengaruh Infrastruktur, Teknologi, Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Per Kapita Dan Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa	Kuantitatif SEM-PLS (Structural Equation Modeling – Partial Least Square) dengan menggunakan WarpPLS 7.0.	Infrastruktur jalan, infrastruktur air, penduduk yang bekerja, dan PDRB per Kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, IP-TIK dan produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 7 No 1, e – ISSN: 2614 – 7181
2	Aditya, S. E. (2019)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia	Kuantitatif analisis data panel dengan model Fixed Effect	Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap GR, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap GR, IDI berpengaruh positif signifikan terhadap GR, Total Populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap GR	<i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB</i> , 8(2)
3	Astuti, D., & Hukom, A. (2023)	Analisis pengaruh PDRB, IPM dan tenaga kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan Tengah	Kuantitatif analisis data panel dengan model Fixed Effect	Tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Gini ratio, PDRB berpengaruh negatif terhadap GR, IPM berpengaruh positif terhadap GR	<i>OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen</i> , 3(2), 73-84
4	Ramadhan, Z. (2023)	Demokrasi dan Ketimpangan Pendapatan: Analisis Data Panel 9 Negara ASEAN Tahun 1973-2020	Kuantitatif analisis data panel dengan model Fixed Effect	terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari demokrasi terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Diponegoro Journal of Economics</i> , 12(1), 45-53
5	Ferdian, F. T., & Sari, Y. P. (2024)	Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan	Kuantitatif dengan pendekatan data panel	Infrastruktur jalan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan	Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP): Volume 1, No.3,

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
		Pendapatan di Pulau Sumatera		pendapatan, listrik yang didistribusikan menurut provinsi (GWh) memiliki pengaruh positif tidak signifikan, internet memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	September 2024, Hal.415-422
6	Ruthshe, G. (2024)	Menjembatani kesenjangan: Menelusuri dampak pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi Indonesia	Kuantitatif dengan pendekatan data panel	Panjang jalan dan penggunaan listrik memiliki hubungan negatif signifikan dengan gini ratio, Konsumsi air minum layak memiliki hubungan positif signifikan dengan gini ratio	<i>AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis</i> , 4(2), 775- 784
7	Sari, D., Taher, A. R. Y., Ananta, P., & Suparta, I. W. (2025)	Ketimpangan Ekonomi Wilayah di Indonesia: Perspektif Analitis Pengaruh Ekonomi, Infrastruktur, dan Demokrasi	Kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel	variabel investasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, dan demokrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah	<i>E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship (EFEBE)</i> , 3(2), 430-442.
8	Wulandari, D. (2020)	Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, aglomerasi industri	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel	PDRB, IPM, aglomerasi produksi industri pengolahan, dan angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan antar daerah	<i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB</i> , 9(1).
9	Syahputra, A., Daffa, D. S., & Siahaan, F. Z. (2024)	Pengaruh Pengangguran, Tingkat Tenaga Kerja Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data sekunder	kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, pengangguran dan tingkat tenaga kerja	<i>Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)</i> , 4(1), 291-299.

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
		Pendapatan Di Sumatra Utara		yang tidak berpengaruh signifikan	
10	Fadilah, N., Nuraini, I., & Susilowati, D. (2017)	Pengaruh industri, tenaga kerja industri dan pdrb sektor industri terhadap disparitas pendapatan antar wilayah provinsi jawa timur	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda berbasis data sekunder	sector industry yang berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan dengan arah positif sedangkan industry dan tenaga kerja industry berpengaruh tidak signifikan	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi JIE</i> , 1(4), 441- 452
11	Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019)	Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Provinsi Aceh	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel	variabel listrik yang berpengaruh sebesar - 0,012594 dan variabel pendidikan yang berpengaruh sebesar -0,060347. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah jalan berpengaruh sebesar -0,009463 dan variabel kesehatan berpengaruh sebesar 0,046067	<i>Jurnal Tata Loka</i> , 21(1), 75- 84
12	Santika, I. N., & Anandari, I. G. A. A. A. (2025)	Analisis pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kuantitatif dengan analisis regresi data panel	infrastruktur listrik berpengaruh positif signifikan, Infrastruktur jalan memiliki pengaruh negatif signifikan, Infrastruktur air bersih menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan.	<i>CAPITALIS: Journal of Social Sciences</i> , 2(3), 47-66
13	Noviana, S. N. (2020)	Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Rasio Infrastruktur Terhadap kesenjangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia	kuantitatif dengan analisis regresi data panel (Fixed Effect Model)	Upah Minimum Regional dan Rasio Infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan	<i>Jurnal Akuntansi AKTIVA</i> , 1(2), 116-135
14	Subrata, B. A. Y. (2017)	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi	Kuantitatif Regresi logit	semua variabel pertumbuhan ekonomi,	<i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB</i> , 6(1)

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
		ketimpangan Pendapatan kabupaten/kota di jawa timur.	(logistic regression)	pertumbuhan ekonomi setelah ada interaksi dari ipm, produktivitas pertanian, dan kualitas jalan baik berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	
15	Syafitri, A. E., Endang, E., & Susilo, J. H. (2025)	Dynamic Panel Data Analysis of Income Inequality in Indonesia	Kuantitatif Regresi Linear Berganda	Indeks Demokrasi dan Indeks Ketidaksetaraan Gender secara signifikan memengaruhi ketidaksetaraan pendapatan. Sementara itu, ICT development index dan Indeks Pembangunan Manusia juga menunjukkan pengaruh yang signifikan	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi, 14(1), 149-162</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Indeks Demokrasi Dengan Ketimpangan Pendapatan

Indeks demokrasi mencerminkan kualitas institusi politik, partisipasi masyarakat, serta kebebasan sipil dalam suatu negara. Dalam teori yang dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson (dalam Sari et al. 2024) menekankan bahwa perbedaan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan antarnegara maupun antarwilayah sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang berlaku, khususnya institusi politik dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan bahwa demokrasi yang tidak disertai dengan kualitas institusi yang baik berpotensi memperkuat struktur ekonomi yang tidak merata, sehingga ketimpangan pendapatan cenderung meningkat (Sari et al. 2024).

Selain itu, penelitian oleh Bariyah (2022) serta Aditya (2020) menunjukkan adanya hubungan positif antara demokrasi dan ketimpangan pendapatan. Peningkatan indeks demokrasi tidak selalu diikuti dengan penurunan ketimpangan, karena dalam praktiknya terdapat beberapa mekanisme yang justru dapat memperlebar kesenjangan. Pertama, meskipun demokrasi menyediakan mekanisme pemilu dan partisipasi publik, dalam banyak kasus proses tersebut dapat didominasi oleh kelompok elite melalui kekuatan ekonomi dan politik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mengakomodasi kepentingan kelompok berpendapatan tinggi dibandingkan masyarakat luas. Kedua, kebijakan yang dihasilkan dalam sistem demokrasi tidak selalu bersifat redistributif, karena adanya pengaruh kelompok kepentingan (*interest groups*) dan praktik oligarki yang dapat menghambat penerapan pajak progresif maupun distribusi belanja publik yang merata. Ketiga, meskipun demokrasi identik dengan transparansi, pada kondisi kelembagaan yang lemah, praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya tetap dapat terjadi dan bahkan dimanfaatkan oleh elite untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi mereka.

2.2.2 Hubungan Tenaga Kerja Dengan Ketimpangan Pendapatan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor fundamental dalam proses produksi yang secara langsung menentukan distribusi pendapatan dalam suatu perekonomian. Dalam perspektif Teori neoklasik dalam pasar tenaga kerja yang dikemukakan oleh Alfred Marshall (dalam Borjas, 2016), tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang digunakan hingga mencapai produktivitas marjinalnya. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor produktif,

akan memperluas kesempatan memperoleh upah sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan ketimpangan cenderung menurun.

Penelitian terdahulu oleh Pramarta (2021) serta Jaumotte, Lall, dan Papageorgiou (2013) menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jaumotte et al. (2013) menjelaskan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja yang luas dan inklusif, berperan dalam menekan ketimpangan dengan cara meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Ketika lebih banyak individu terserap ke dalam pasar kerja, distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan upah sehingga memperkecil kesenjangan pendapatan. Sementara itu, Pramarta (2021) menemukan bahwa pemerataan distribusi tenaga kerja antarwilayah dan antar sektor turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan, karena mencegah terjadinya konsentrasi tenaga kerja pada wilayah atau sektor tertentu saja. Dengan demikian, kombinasi antara peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan distribusi tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menurunkan ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Hubungan Infrastruktur Dengan Ketimpangan Pendapatan

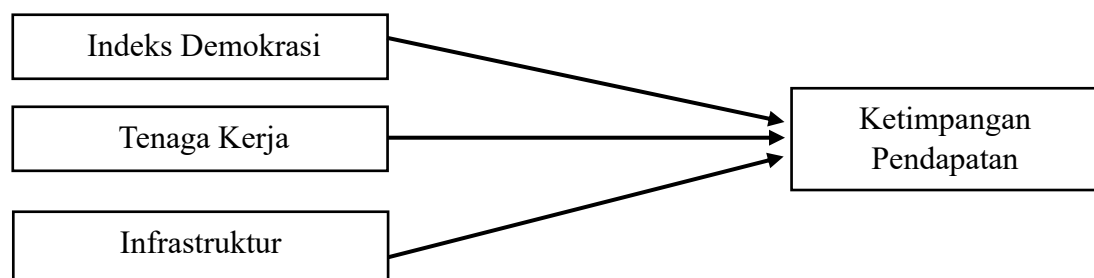
Infrastruktur merupakan bagian penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hubungan antara infrastruktur dan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan secara komprehensif

melalui Teori *New Economic Geography* (NEG) yang dikembangkan oleh Paul Krugman (dalam Ruthshe, G, 2024). Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu akibat adanya keunggulan lokasi (*agglomeration economies*), yang dipengaruhi oleh faktor seperti biaya transportasi, skala ekonomi dan mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks ini, infrastruktur jalan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan penurunan biaya transportasi dan peningkatan konektivitas wilayah. Ketika rasio Panjang Jalan meningkat dan kualitasnya membaik, maka hambatan spasial antar wilayah akan berkurang sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di daerah tertentu dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Wilayah dengan infrastruktur jalan yang lebih baik cenderung memiliki akses ekonomi yang lebih tinggi diartikan sebagai kondisi dimana suatu wilayah memiliki kemudahan dalam mobilitas faktor produksi, distribusi barang dan jasa, serta keterhubungan dengan pasar dan pusat kegiatan ekonomi, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah tertinggal (Kartiasih, F, 2019). Berdasarkan teori *New Economic Geography* (dalam Ruthshe, G, 2024), peningkatan dan pemerataan panjang infrastruktur jalan memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, di mana semakin baik dan merata jaringan jalan maka semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran dalam mengurangi ketimpangan

melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah (Sukwika, 2018). Penelitian oleh Santika et al. (2025) juga menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga apabila pembangunan infrastruktur meningkat maka akan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan antar wilayah.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga secara parsial Indeks Demokrasi berpengaruh positif, sedangkan Tenaga Kerja dan Infrastruktur berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 34 provinsi Indonesia tahun 2022-2024.
2. Diduga Indeks Demokrasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur secara bersama berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 34 provinsi Indonesia tahun 2022-2024.